



BERITA ACARA
NOMOR : 172.1.1/13 TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **November** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. K.H. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
3. FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
4. H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
5. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda beserta alasannya untuk tahun 2020.

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang terdiri dari 20 Rancangan Peraturan Daerah.
3. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Dibuat di Kebumen.

Pihak Kedua
KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



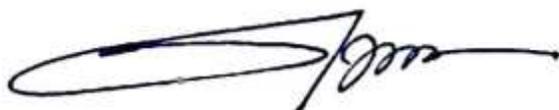
(H. SARIMUN, S.Sy.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



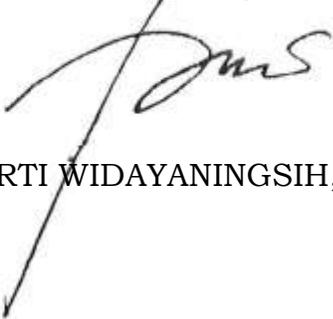
(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



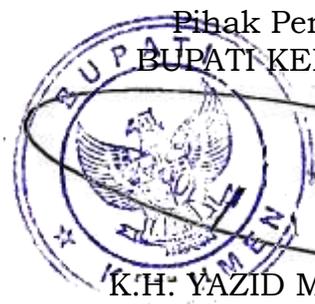
(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)

Pihak Pertama
BUPATI KEBUMEN



K.H. YAZID MAHFUDZ

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati
Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 172.1.1/13 TAHUN 2019
Tanggal : 27 November 2019

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

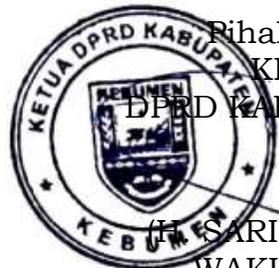
| No | Tentang | Maksud dan Tujuan | Latar Belakang | Status | | Disertai | | Unit/ Instansi Terkait | Target |
|----|--|--|---|--------|------|----------|---------|------------------------------|--------|
| | | | | Baru | Ubah | NA | Raperda | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. | Mewujudkan regulasi yang mengatur perkembangan wilayah Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi, dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif. | Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 sudah tidak relevan. | | √ | | √ | Komisi D | MS I |
| 2 | Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kebumen. | Peraturan yang bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, efektif, efisien pencapaian prioritas sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan KUA PPAS. | | √ | | √ | Bapem Perda | MS I |
| 3 | Raperda tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan | Mengatur pembentukan kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang | | √ | | √ | | Bagian Organisasi | MS I |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|------|
| | Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | |
| 4 | Raperda tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangann Daerah | Mengatur pengelolaan keuangan Daerah termasuk di dalamnya penyusunan dan pertanggungjawaban APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, BLUD, Penyelesaian Kerugian Daerah serta Informasi Keuangan Daerah | | √ | | √ | | BPKAD | MS I |
| 5 | Raperda tentang Perseoda BPR/S Bank Kebumen | Mengatur perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah serta Pengelolaan Perseroda secara umum | | √ | | √ | | Bagian Perekonomian | MS I |
| 6 | Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Mengatur penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat meliputi tertib kesehatan; tertib usaha dan usaha tertentu; tertib jalan dan fasilitas umum; tertib lingkungan; tertib penghuni bangunan dan bangunan tertentu; tertib sosial; tertib tempat hiburan dan keramaian; dan tertib peran serta masyarakat | | √ | | √ | | Satuan Polisi Pamong Praja | MS I |
| 7 | Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan | Mengatur penyelenggaraan Kearsipan | | √ | | √ | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | MS I |
| 8 | Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan | Mengatur penyelenggaraan Perpustakaan | | √ | | √ | | | MS I |

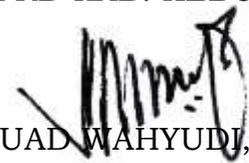
| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|
| 9 | Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas | Mengatur penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkait pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, Pelayanan Publik habilitasi dan rehabilitasi, ragam disabilitas, pengarusutamaan serta pembiayaan | | √ | | √ | | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | MS I |
| 10 | Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen | Mengatur penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada BUMD | | √ | | √ | | Bagian Perekonomian | MS I |
| 11 | Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Menengah dan Kejuruan | Mengatur perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Serta Pengelolaan perumda secara umum | | √ | | √ | | Bagian Perekonomian | MS II |
| 12 | Raperda Tentang Perseroda Luk Ulo Fama Kabupaten Kebumen | Mengatur Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah serta pengelolaan Perseroda secara Umum | | √ | | √ | | Bagian Perekonomian | MS II |
| 13 | Penanganan Tuberkulosis | Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam penanggulangan Tuberkulosis. | Amanat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. | √ | | √ | √ | Komisi B | MS II |
| 14 | Penyelenggaraan Kepariwisata | - Regulasi tentang penyelenggaraan | - Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang | | √ | √ | √ | Komisi C | MS II |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|---|---|----------|-----------------------|
| | | <p>kepariwisataan di Kabupaten Kebumen perlu diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan mendorong kesempatan berusaha.</p> <p>- Perda Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kepariwisata sudah tidak relevan.</p> | <p>Kepariwisataan.</p> <p>- Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.</p> | | | | | | |
| 15 | Perlindungan dan Pengelolaan Geopark Karangsembung Karangbolong Kebumen | Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Kebumen sebagai Pusat Ilmu Kebumian terkait Geopark Karangsembung – Karangbolong. | <p>- Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>- Amanat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Taman Bumi.</p> | √ | | | √ | Komisi D | MS II |
| 16 | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 | Mengatur Realisasi Pelaksanaan PBD Tahun Anggaran 2019 | | √ | | √ | | BPKAD | KUMU LATIF/ III |
| 17 | Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 | Mengatur perubahan APBD tahun Anggaran 2020 | | √ | | √ | | BPKAD | KUMU LATIF/ III |
| 18 | Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 | Mengatur APBD tahun Anggran 2021 | | √ | | √ | | BPKAD | KUMU LATIF/ III |
| 19 | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2039 | Mewujudkan regulasi yang mendukung terwujudnya Kabupaten Kebumen sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, | Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. | √ | | | √ | Komisi D | MS III |

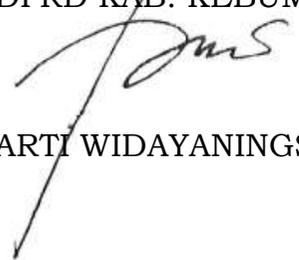
| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|----------|--------|
| | | perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal. | | | | | | | |
| 20 | Penyelenggaraan Bantuan Hukum | Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum untuk mencapai Peradilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. | √ | | √ | √ | Komisi A | MS III |


 Pihak Kedua
 KETUA
 DPRD KAB. KEBUMEN
 (H. SARIMUN, S.Sy.)
 WAKIL KETUA
 DPRD KAB. KEBUMEN


 Pihak Pertama
 BUPATI KEBUMEN
 KH. YAZID MAHFUDZ


 (FUAD WAHYUDI, S.T.)
 WAKIL KETUA
 DPRD KAB. KEBUMEN


 (H. AGUNG PRABOWO, S.H.)
 WAKIL KETUA
 DPRD KAB. KEBUMEN


 (YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)